

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

LAPORAN KEUANGAN

Bagian Anggaran 005.01

**Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020**



Jl. Letnan Akhmadi No. D-80 Purbalingga

Purbalingga - Jawa Tengah 53316

Telp. (0281) 891009 Fax. (0281) 895668



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
KELAS IB

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Letnan Akhmadi No. D-80 Purbalingga
Telp. (0281) 891009 Fax. (0281) 895668
Purbalingga - Jawa Tengah 53316
e-mail : pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Purbalingga adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

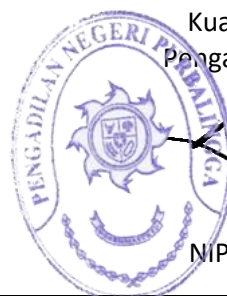
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Purbalingga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Purbalingga, 22 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Negeri Purbalingga



BAIT HARFIAH, SH

NIP. 196804211989032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja.....	37
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	42
C.1. Aset Lancar.....	42
C.2. Aset Tetap	44
C.3. Aset Lainnya	49
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	50
C.6. Ekuitas	51
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	52
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	52

D.2.	Beban Pegawai	52
D.3.	Beban Persediaan	53
D.4.	Beban Barang dan Jasa	54
D.5.	Beban Pemeliharaan	54
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	55
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	56
D.8.	Kegiatan Non Operasional	56
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	58
E.1.	Ekuitas Awal	58
E.2.	Surplus/(defisit) LO	58
E.3.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....	58
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	59
E.5.	Ekuitas Akhir.....	59
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	60
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	60
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	60
Daftar dan Lampiran		63
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap		64
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Ak		68

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Jl. Letnan Akhmadi No. D-80 Purbalingga - Jawa Tengah 53316

Telp. (0281) 891009 Fax. (0281) 895668

e-mail : pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

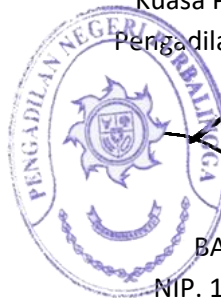
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purbalingga, 22 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Pengadilan Negeri Purbalingga




BAITI HARFIAH, SH
NIP. 196804211989032001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp8.998.958 atau mencapai 118,17 persen dari estimasi Pendapatannya sebesar Rp7.615.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp8.514.030.650 atau mencapai 98,19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.671.000.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.681.310.865, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp883.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp19.680.427.865; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyesuaian piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp22.407.024 dan Rp19.658.903.841.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasional, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.318.041, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.077.353.995 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp5.071.035.954). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar (Rp130.462.708) dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar (Rp5.201.498.662)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp15.243.656.982 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp5.201.498.662) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.111.714.049 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.505.031.472 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp19.658.903.841.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

	Uraian	Catatan	2020			2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Perpajakan	B.1.1	0	0	0	0
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	7.615.000	8.998.958	118,17	3.080.987
3.	Penerimaan Hibah	B.1.3				
	Jumlah Pendapatan dan Hibah		7.615.000	8.998.958	118,17	3.080.987
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.381.068.000	3.367.972.778	99,61	3.728.081.441
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.171.792.000	1.059.545.652	90,42	990.632.374
3.	Belanja Modal	B.2.3.	4.118.140.000	4.086.512.000	99,23	36.330.000
	Jumlah Belanja Negara		8.671.000.000	8.514.030.430	98,19	4.755.043.815

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	4.512.000	572.100
Jumlah Aset Lancar		883.000	572.100
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	11.249.822.000	10.940.120.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.393.978.407	2.369.078.407
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	9.171.549.000	4.215.738.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	48.678.742	48.678.742
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2. 5.	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2. 6.	(3.183.600.284)	(2.453.701.735)
Jumlah Aset Tetap		19.680.427.865	15.119.913.414
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	0	153.875.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	0	(7.791.140)
Jumlah Aset Lainnya		0	146.083.860
Jumlah Aset		19.681.310.865	15.266.569.374
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	21.183.024	22.912.392
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 2.	1.224.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22.407.024	22.912.392
Jumlah Kewajiban		22.407.024	22.912.392

EKUITAS			
Ekuitas	C.5	19.658.903.841	15.243.656.982
Jumlah Ekuitas		19.658.903.841	15.243.656.982
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		19.681.310.865	15.266.569.374

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	6.318.041	3.080.957
Jumlah Pendapatan		6.318.041	3.080.957
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.367.623.578	3.728.430.641
Beban Persediaan	D. 3	72.706.850	61.904.448
Beban Barang dan Jasa	D. 4	567.340.447	462.225.156
Beban Pemeliharaan	D. 5	383.412.737	407.792.980
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	46.611.000	73.191.454
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bunga	D. 8	0	0
Beban Subsidi	D. 9	0	0
Beban Hibah	D. 10	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 11	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 12	639.659.383	432.600.467
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 11	0	0
Beban Transfer	D. 12	0	0
Beban Lain-lain	D. 13	0	0
Jumlah Beban		5.077.353.995	5.166.145.146
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.071.035.954)	(5.163.064.189)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(142.679.286)	0

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.456.789	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	144.136.075	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.216.578	43.995
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.873.178	128.830
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	656.600	84.835
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(130.462.708)	43.995
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(5.201.498.662)	(5.163.020.194)
Pos Luar Biasa D. 13	0	0
Pos Luar Biasa	0	0
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus/Defisit Laporan Operasional	(5.201.498.662)	(5.163.020.194)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2020	2019
Ekuitas Awal	E. 1	15.243.656.982	15.483.812.158
Surplus/Defisit LO	E. 2	(5.201.498.662)	(5.163.020.194)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E. 3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 4	1.111.714.049	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	1.203.901.000	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	(92.186.951)	0
Lain-Lain	E. 5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 6	8.505.031.472	4.922.865.018
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 7	4.415.246.859	(240.155.176)
Ekuitas Akhir		19.658.903.841	15.243.656.982

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagai Akun Standar;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagai Akun

Standar;

11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB

Visi Pengadilan Negeri Purbalingga adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga Yang Agung, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Purbalingga menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Purbalingga adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Meningkatkan pengawasan di semua bidang.
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya peradilan.
4. Meningkatkan kinerja aparat peradilan.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dilingkungan kantor.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri

Purbalingga Kelas IB dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk

direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut di dasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan

kerugian Negara/daerah.

- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tak Berwujud (ATB) dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja

yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	TAHUN 2020	
	DIPA AWAL	DIPA REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	2.575.000	7.615.000
Jumlah Pendapatan	2.575.000	7.615.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.937.600.000	3.381.068.000
Belanja Barang	1.1671.712.000	1.171.792.000
Belanja Modal	7.447.240.000	4.118.140.000
Jumlah Belanja	12.546.552.000	8.671.000.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp8.998.958*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.998.958 atau mencapai 118,17 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp7.615.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Purbalingga adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.615.000	7.542.041	240,83
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1.456.789	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	128	0,00
Jumlah		7.615.000	8.998.958	118,17

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.917.971 atau 192,08 persen dibandingkan pada Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan kenaikan tarif perhitungan biaya sewa rumah dinas hakim dan penjualan asset BMN dari bongkaran gedung bangunan kantor Pengadilan Negeri Purbalingga secara lelang.

Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019	Naik (Turun)	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.542.041	3.080.987	4.461.054	144,79
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.456.789	0	1.456.789	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	128	0	128	0
Jumlah		8.998.958	3.080.987	5.917.971	192,08

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja Negara
Rp8.514.030.430

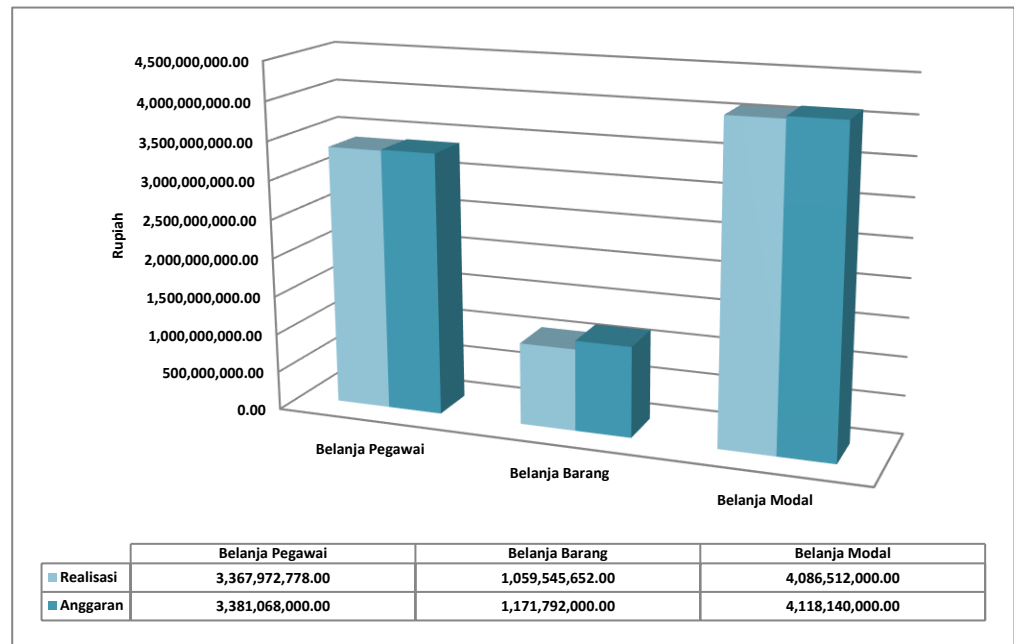
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.514.030.430 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,19 persen dari anggaran senilai Rp8.671.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.381.068.000	3.367.972.778	99,61
Belanja Barang	1.171.792.000	1.059.545.652	90,42
Belanja Modal	4.118.140.000	4.086.512.000	99,23
Total Belanja Bruto	8.671.000.000	8.514.030.430	98,19
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Neto	8.671.000.000	8.514.030.430	98,19

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp3.758.986.615 atau sebesar 79,05 persen dari realisasi tahun lalu. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada tahun anggaran 2020 kantor Pengadilan Negeri Purbalingga mendapatkan alokasi DIPA belanja modal berupa renovasi dan perluasan Gedung kantor sejumlah Rp4.118.140.000.

Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	3.367.972.778	3.728.081.441	360.108.663	9,66
Belanja Barang	1.059.545.652	990.632.374	68.913.278	6,96
Belanja Modal	4.086.512.000	36.330.000	4.050.182.000	11.148,31
Jumlah	8.514.030.430	4.755.043.815	3.758.986.615	79,05

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja Pegawai
Rp3.367.972.778*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.367.972.778 dan Rp3.728.081.441.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 9,65 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 jumlah pegawai berkurang akibat adanya promosi dan pensiun tanpa adanya penambahan pegawai baru/pengganti.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.534.291.360	1.629.417.280	(95.125.920)	(5,84)
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.479	24.773	(2.294)	(9,26)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	107.486.650	122.783.340	(15.296.690)	(12,46)
Beban Tunj. Anak PNS	27.279.910	30.592.538	(3.312.628)	(10,82)
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	37.920.000	(1.520.000)	(4,01)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.198.020.000	1.399.800.000	(201.780.000)	(14,41)
Beban Tunj. PPh PNS	131.829.879	161.125.916	(29.296.037)	(18,18)
Beban Tunj. Beras PNS	66.336.720	71.406.120	(5.069.400)	(7,09)
Beban Uang Makan PNS	253.611.000	263.799.000	(10.188.000)	(3,86)
Beban Tunjangan Umum PNS	12.695.000	11.215.000	1.480.000	13,19
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Bruto	3.367.972.998	3.728.083.967	(360.110.969)	(9,65)
Pengembalian Belanja	220	2.526	(2.306)	(91,29)
Total Belanja Neto	3.367.972.778	3.728.081.441	(360.108.663)	(9,65)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
Rp1.059.545.652*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.059.545.652 dan Rp990.632.374.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,95 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2020 pagu belanja barang lebih besar dibandingkan tahun 2019 salah satunya mendapat tambahan pagu di tahun berjalan untuk sewa rumah dinas hakim.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik (Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	0	13.250.000	(13.250.000)	(100)
Belanja Barang Operasional	468.804.409	361.734.868	107.069.541	29,60
Belanja Jasa	99.916.206	87.044.489	12.871.717	14,78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	46.611.000	59.941.454	(13.330.454)	(22,24)
Belanja Barang Persediaan	60.801.300	60.868.583	(67.283)	(0,11)
Belanja Pemeliharaan	383.412.737	407.792.980	(24.380.243)	(5,97)
Total Belanja Bruto	1.059.545.652	990.632.374	68.913.278	6,95
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	1.059.545.652	990.632.374	68.913.278	6,95

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
Rp4.086.512.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sejumlah Rp4.086.512.000 dan Rp36.330.000.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar 11.148,31 persen dibandingkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019. Hal ini disebabkan karena

pada Tahun Anggaran 2020 kantor Pengadilan Negeri Purbalingga mendapatkan alokasi DIPA belanja modal renovasi dan perluasan Gedung kantor sejumlah Rp4.093.140.000.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Perubahan	
			Rp.	%
Peralatan dan Mesin	24.900.000	36.330.000	(11.430.000)	(31,46)
Gedung dan Bangunan	4.061.612.000	0	4.061.612.000	100
Total Belanja Bruto	4.086.512.000	36.330.000	4.050.182.000	11.148,31
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	4.086.512.000	36.330.000	2.654.879.000	11.148,31

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar
Rp883.000* Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp883.000 dan Rp572.100.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	883.000	572.100
Total Aset Lancar	883.000	572.100

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0* Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam table di bawah:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	Bank	0	0
	Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31Desember 2020	31 Desember 2019
1.	Belanja Pegawai dibayar dimuka (Prepaid)	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp883.000*

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp883.000 dan Rp572.100. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname fisik Nomor W12.U25/2201/PL.03/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp883.000.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020	2019
1	Barang Konsumsi	883.000	572.100
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		883.000	572.100

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp19.680.427.865

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp19.680.427.865 dan Rp15.119.913.414. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019	Perubahan
1	Tanah	11.249.822.000	10.940.120.000	309.702.000
2	Peralatan dan Mesin	2.393.978.407	2.369.078.407	24.900.000
3	Gedung dan Bangunan	9.171.549.000	4.215.738.000	4.995.811.000
4	Aset Tetap Lainnya	48.678.742	48.678.742	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		22.864.028.149	17.573.615.149	5.290.413.000
Akumulasi Penyusutan		(3.183.600.284)	(2.543.701.735)	(729.898.549)
Nilai Buku Aset Tetap		19.680.427.865	15.119.913.414	4.560.514.451

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp11.249.822.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sama masing-masing sebesar Rp11.249.822.000 dan Rp10.940.120.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah	3.615	3849901	PN.Pbg	Gedung Kantor	3.408.958.000
2.	Tanah	1.690	8265374	PN. Pbg	Rumah Dinas	7.840.864.000
			B.2558597			
			B.2558596			
			AA.459600			
Jumlah						11.249.822.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp11.249.822.000 dan Rp10.940.120.000.

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah pada kantor Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2020 bertambah dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya koreksi revaluasi aset tetap di tahun 2020 sehingga nilai tanah bertambah sejumlah Rp309.702.000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin*
Rp2.393.978.407

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.393.978.407 dan Rp2.369.078.407. Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin pada tahun 2020 mengalami kenaikan Rp24.900.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar berasal dari Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 2 unit PC Komputer untuk Panitera.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	2.369.078.407
Mutasi Tambah	
Pembelian Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	24.900.000
Mutasi Kurang	
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Saldo per 31 Desember 2020	2.393.978.407
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	(2.124.120.086)
Nilai Buku 31 Desember 2020	269.858.321

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp9.171.549.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp9.171.549.000 dan Rp4.215.738.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	4.215.738.000
Mutasi Tambah	4.955.811.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	9.171.549.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(1.059.480.198)
Nilai Buku 31 Desember 2020	8.112.068.802

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada kantor Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sejumlah Rp4.955.811.000 yang penambahannya berasal dari belanja modal renovasi dan perluasan Gedung dan bangunan sejumlah Rp4.061.612.000 dan koreksi revaluasi sejumlah Rp894.199.000. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan
Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0. Saldo tersebut sama dengan tahun sebelumnya.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp48.678.742*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp48.678.742.

Nilai Perolehan Aset Tetap lainnya pada kantor Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2020 sama dengan Nilai Perolehan Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp48.678.742 tidak ada perubahan mutasi tambah maupun mutasi kurang.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	48.678.742
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2020	48.678.742
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0
Nilai Buku 31 Desember 2020	48.678.742

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing dan Rp0, merupakan renovasi dan perluasan Gedung kantor Pengadilan Negeri Purbalingga yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

PAGU DIPA renovasi dan perluasan gedung kantor Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 2020 sejumlah Rp 4.093.140.000 dengan sumber dana Rupiah Murni. Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap
(Rp3.183.600.284)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing (Rp3.183.600.284) dan (Rp2.453.701.735).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.393.978.407	(2.124.120.086)	269.858.321
2	Gedung dan Bangunan	9.171.549.000	(1.059.480.198)	8.112.068.802
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	48.678.742	0	48.678.742
Jumlah		11.614.206.149	(3.183.600.024)	8.430.605.865

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp146.083.860. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	153.875.000
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	153.875.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	7.791.140
	Nilai buku Aset Lainnya	0	146.083.860

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp0

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp153.875.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Purbalingga serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah:

Saldo per 31 Desember 2019	153.875.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	153.875.000
Saldo per 31 Desember 2020	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Llampiran Laporan Keuangan ini.

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan/A
mortisasi Aset
Lainnya
Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp7.791.140. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	0
Nilai Buku	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp21.183.024*

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp21.183.024 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2020	2019
Belanja Pegawai belum dibayar	0	0
Belanja Langganan Listrik belum dibayar	8.170.973	0
Belanja Langganan Telepon belum dibayar	141.003	0
Belanja Langganan Internet belum dibayar	12.363.377	0
Belanja Langganan Air belum dibayar	435.920	0
Jumlah	21.183.024	0

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp1.224.000

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.224.000 dan Rp0, merupakan pendapatan yang sudah diterima kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas negara tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
per dan 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	2020	2019
Pendapatan sewa tanah dan gedung	1.224.000	0
Jumlah	1.224.000	0

C.6. Ekuitas

Ekuitas
Rp19.658.903.841

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.658.903.841 dan Rp15.243.656.982. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNPB
Rp6.318.041 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp6.318.041 dan Rp3.080.957. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2020	2019
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.318.041	3.080.957
2.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0
5.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
Jumlah		6.318.041	3.080.957

Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan berasal dari pendapatan sewa rumah dinas Hakim dan Panitera sebanyak 6 rumah dinas yang ditempati dari total 7 rumah dinas dan sewa kantin.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp3.367.623.578

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.367.623.578 dan Rp3.728.430.641. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.534.291.360	1.629.417.280	(95.125.920)	(5,84)
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.479	24.773	(2.294)	(9,26)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	107.486.650	122.783.340	(15.296.690)	(12,46)
Beban Tunj. Anak PNS	27.279.910	30.592.538	(3.312.628)	(10,82)
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	37.920.000	(1.520.000)	(4,01)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.198.020.000	1.399.800.000	(201.780.000)	(14,41)
Beban Tunj. PPh PNS	131.829.879	161.125.916	(29.296.037)	(18,18)
Beban Tunj. Beras PNS	66.336.720	71.406.120	(5.069.400)	(7,09)
Beban Uang Makan PNS	253.611.000	263.799.000	(10.188.000)	(3,86)
Beban Tunjangan Umum PNS	12.695.000	11.215.000	1.480.000	13,19
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Jumlah	3.367.623.578	3.728.430.641	(360.807.063)	(9,67)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp72.706.850*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp72.706.850 dan Rp61.904.448. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	72.706.850	61.904.448	10.802.402	17,45
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	72.706.850	61.904.448	10.802.402	17,45

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp567.340.447*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp567.340.447 dan Rp462.225.156. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	361.030.687	276.004.295	85.026.392	30,80
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.970.050	7.289.900	(1.319.850)	(18,10)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43.200.000	51.600.000	(8.400.000)	(16,27)
Beban Barang Operasional Lainnya	38.035.250	37.815.673	219.577	0,58
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	20.097.850	0	20.097.850	0
Beban Langganan Listrik	86.550.621	83.047.733	3.502.888	4,21
Beban Langganan Telepon	1.701.329	1.857.675	(156.346)	(8,41)
Beban Langganan Air	4.954.660	4.409.880	544.780	12,35
Beban Sewa	5.400.000	0	5.400.000	0
Beban Jasa Profesi	0	200.000	(200.000)	(100)
Beban Jasa Lainnya	400.000	0	400.000	0
Jumlah	567.340.447	462.225.156	105.115.291	22,74

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp383.412.737*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp383.412.737 dan Rp407.792.980. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	191.751.000	201.386.750	(9.635.750)	(4,78)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Penanganan Pandemi COVID-19	1.106.000	0	1.106.000	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	54.566.000	67.131.000	(12.565.000)	(18,71)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.989.737	139.275.230	(3.285.493)	(36,56)
Jumlah	383.412.737	407.792.980	(24.380.243)	(5,97)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp46.611.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp46.611.000 dan Rp73.191.454. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	42.011.000	73.191.454	(31.180.454)	(42,60)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.600.000	0	4.600.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Jumlah	46.611.000	73.191.454	(26.580.454)	(36,32)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp639.659.383*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp639.659.383 dan Rp432.600.467. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	2020	2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	176.241.879	175.793.133	448.746	(0,25)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	461.469.719	254.859.549	206.610.170	81,06
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Irigasi	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.947.785	1.947.785	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	639.659.383	432.600.467	207.058.916	47,86

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus(defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional
(Rp130.462.708)*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2020	2019	Naik(Turun)	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(142.679.286)	0	(142.679.286)	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.456.789	0	1.456.789	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	144.136.075	0	144.136.075	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.216.578	43.995	12.172.583	27.668,10
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	12.873.050	128.830	12.744.348	9.892,40
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	656.600	84.835	571.765	673,97
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	(130.462.708)	43.995	(130.506.703)	200.000,00

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp15.243.656.982

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp15.243.656.982 dan Rp14.483.812.158.

E.2. Surplus/(defisit) LO

Surplus/(defisit) LO
(Rp5.201.498.662)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp5.201.498.662) dan (Rp2.607.989.776). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang
Menambah/Men
urangi Ekuitas
Rp1.111.714.049

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.111.714.049 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar. Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari:

**Tabel 51 Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Koreksi Ekuitas	Nilai
Penyesuaian Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	1.111.714.049
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi lain-lain	0
Jumlah	0

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari koreksi revaluasi aset tetap.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp8.505.031.472*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.505.031.472 dan Rp4.922.865.018. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

**Tabel 52 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.514.030.430
Diterima dari Entitas Lain	(8.998.958)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	8.505.031.472

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp19.658.903.841*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.658.903.841 dan Rp15.243.656.982.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan kantin tahun 2021 yang diterima di tahun 2020 sejumlah Rp1.224.000 dikarenakan jangka waktu sewa selama 2 tahun dan pembayaran sewa harus dibayar diawal perjanjian sewa.
2. Terdapat belanja langganan listrik pemakaian bulan Desember 2020 sejumlah Rp8.170.973 yang baru dibayar dibulan Januari 2021.
3. Terdapat belanja langganan Telepon pemakaian bulan Desember 2020 sejumlah Rp141.003 yang baru dibayar dibulan Januari 2021.
4. Terdapat belanja langganan air (PDAM) bulan Desember 2020 sejumlah Rp435.920 yang baru dibayar dibulan Januari 2021.
5. Terdapat belanja langganan i pemaanternetian bulan Desember 2020 sejumlah Rp12.363.377 yang baru dibayar dibulan Januari 2021.
6. Terdapat belanja pengiriman surat dinas melalui kantor pos bulan Desember 2020 sejumlah Rp58.000 yang baru dibayar dibulan Januari 2021.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purbalingga A/C 0074-01-000940-30-0 a.n. Bpg 029 Pengadilan Negeri Purbalingga yang digunakan sebagai

Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purbalingga A/C 0074-01-000311-30-7 a.n. Bpg 029 Pengadilan Negeri Purbalingga yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0.
3. PT. Bank BTN Cab. Purwokerto A/C 000000-33-01-000516-3 a.n. RPL 029 PN Purbalingga Kelas IB Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.906.829.935.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai Revisi DIPA Tahun Anggaran 2020 pada kantor Pengadilan Negeri Purbalingga dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan halaman III DIPA pada tanggal 20 Februari 2020.
2. Revisi DJA oleh Eselon I berupa pengurangan pagu DIPA Belanja Modal sejumlah Rp3.191.680.000 pada tanggal 29 April 2020.
3. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA pada tanggal 4 Juni 2020.
4. Revisi DJA oleh Eselon I berupa penambahan pagu sewa rumah dinas hakim sejumlah Rp10.080.000 pada tanggal 2 Juli 2020.
5. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA pada tanggal 16 Juli 2020.
6. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA pada tanggal 7 September 2020.
7. Revisi DJA oleh Eselon I berupa penarikan pagu gaji dan tunjangan sejumlah Rp556.532.000 pada tanggal 2 Oktober 2020.
8. Revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA pada tanggal 9 November 2020.

F.2.5. Ralat SPM, SP2D, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai ralat SPM, SP2D, SSBP dan SSPB:

Terdapat ralat SPM/SP2D tanggal 2 Oktober 2020 Nomor SPM 00082/05/098036 tanggal 15 September 2020 yang telah diterbitkan SP2D Nomor 200291304004681 tanggal 16 September 2020 dikarenakan kesalahan input pada Sub Komponen (B) Langganan Daya dan Jasa akun 521111 sejumlah Rp152.000 yang seharusnya diinput pada Sub Komponen (A) Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran akun 521111.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Terdapat perubahan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan pada Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga yaitu pada Pejabat Pembuat Komitmen yang dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Purbalingga.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
BEBAN PENYUSUTAN AKUMULASI
PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU
ASET TETAP*

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020
Pengadilan Negeri Purbalingga**

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai	Akm. Peny. s.d Periode ini	Beban Peny. Periode ini	Ak. Peny. Periode ini	Total Akm. Peny. S.d Periode ini	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	654	2.402.477.407	1.956.377.207	176.241.879	0	2.132.619.086	269.858.321
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	8	402.610.003	351.467.145	25.571.429	0	377.038.574	25.571.429
2.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	5.000	5.000	0	0	5.000	0
3.	Alat Kantor	119	185.653.100	174.672.140	6.237.760	0	180.909.900	4.732.200
4.	Alat Rumah Tangga	423	660.211.114	548.682.172	46.661.942	0	593.344.114	64.867.000
5.	Alat Studio	9	107.796.000	71.609.600	15.559.200	0	87.168.800	20.627.200
6.	Alat Komunikasi	3	31.038.000	31.038.000	0	0	31.038.000	0
7.	Peralatan Pemancar	1	35.000.000	35.00.000	0	0	35.000.000	0
8.	Komputer Unit	56	772.745.600	620.651.576	56.904.900	0	677.556.476	95.189.124
9.	Peralatan Komputer	32	207.224.590	123.057.574	25.306.648	0	148.364.222	58.860.368
10.	Peralatan Olah Raga	2	194.000	194.000	0	0	194.000	0
B.	Gedung dan Bangunan	15	9.171.549.000	505.823.528	461.469.719	92.186.951	1.059.480.198	8.112.068.802
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7	7.314.267.000	329.944.564	344.840.448	34.807.372	709.592.384	6.604.674.616
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7	1.207.722.000	164.536.892	100.977.223	37.417.555	302.931.670	904.790.330
3.	Tugu/tanda Batas	1	649.560.000	11.342.072	15.652.048	19.962.024	46.956.144	602.603.856
C.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	0	0	7.791.140	1.947.785	-9.738.925	0	0
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja		0	7.791.140	1.947.785	-9.738.925	0	0
Total			11.574.026.407	2.469.991.875	639.659.383	82.448.026	3.192.099.284	8.381.927.123

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		JML S.D 1 JAN 2020	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JML S.D 31 DES 2020	KET
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	4.061.612.000	4.061.612.000	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	4.061.612.000	4.061.612.000	0	-
70101010004	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	-
TOTAL		0	4.061.612.000	4.061.612.000	0	

Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa
Per 31 Desember 2020

No	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
					Nilai	Keterangan
1	NIHIL					
2						
3						
Jumlah						

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

